

## **HAK VETO PRESIDEN DALAM KONSTRUKSI TATA PEMERINTAHAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**INTISARI**  
**OLEH :**  
**SUPANGAT<sup>1</sup>, ANDI SANDI Ant.T.T.<sup>2</sup>**

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana Efektifitas hak veto presiden dalam konstruksi tata pemerintahan di Indonesia Berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana hak veto itu dapat dikatakan efektif dan bagaimana peranan hak veto dalam mewujudkan pemerintahan yang *checks and balances* antara eksekutif dengan legislatif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang merupakan data sekunder atau disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk menunjang dan melengkapi data sekunder tersebut, maka peneliti melakukan pula penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang ahli di bidangnya, penelitian ini sering pula disebut penelitian yang bersifat *sosiolegal*, yaitu penelitian yang menggabungkan antara pendekatan hukum dan pendekatan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, “Hak Veto Presiden dalam Konstruksi Tata Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Sudah barang tentu yang menjadi permasalahan yang pertama adalah *Efektifitas Hak Veto Presiden dalam Sistem Tata Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945?* tolak ukur hak veto dapat di katakan efektif bilamana, hak veto tersebut di gunakan pada saat yang tepat, harus mengutamakan kemaslahatan rakyat, dan bila mana hak veto digunakan pada suatu peraturan dan atau perundang-undangan seketika itu langsung berhenti. Tidak dapat diajukan dalam sidang umum DPR masa itu. Dengan begitu hak veto dapat dikatakan berjalan efektif.

Permasalahan kedua *Pengaruh Hak Veto Presiden dalam mencapai pemerintahan yang Checks and Balances*. Hak veto presiden sangat menunjang sekali terkait dengan mekanisme *checks and balances*, namun jika diimbangi juga sebagai anggota leges latif/parlemen DPR juga hendaknya memiliki hak veto agar lebih menyeimbangkan ketika presiden tidak mau mengesahkan RUU yang sudah disetujui bersama dengan alasan pribadi bahkan kelompok dan atau golongan. Dengan demikian sudah barang tentu jalannya roda pemerintahan akan dapat berjalan secara selaras, seimbang, dan selalu beriringan.

**Kata kunci : Hak Veto Presiden dalam Tata Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

**THE PRESIDENTIAL VETO IN INDONESIA GOVERNANCE SYSTEM  
BASED ON THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA**

**ABSTRACT**

**BY:**

**SUPANGAT<sup>1</sup>, ANDI SANDI Ant.T.T.<sup>2</sup>**

This thesis aims to find out, how the effectiveness of a presidential veto in the construction of governance in Indonesia Under the constitution of the republic of Indonesia in 1945. How to veto it and how effective it can be said the role of veto to make government checks and balances between the executive with the legislature.

The method used in this thesis is a normative juridical methods, the research done by examining the legal material which is referred to as secondary data or library research (library research). To support and complement the secondary data, the researchers also conducted a field research by interviewing the speakers who are experts in their field, research is often also referred to research that is sosiolegal, the research approach combines legal and social approaches.

Based on the results of research and discussion, "Veto President of the Construction of Governance in Indonesia based on the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945." Of course that is a problem that the first is the effectiveness of Veto President of the System of Governance in Indonesia based on the Constitution NRI In 1945? benchmark veto effectively when they can say, veto it in use at the right time, should give priority to the benefit of the people, and whenever a veto is used in a rule or law-your invitation immediately stopped. Can not be filed in the House of Representatives public hearing period. With such a veto can be said to be effective.

The second problem Influence Presidential Veto in achieving governance Checks and Balances. A presidential veto strongly support all related to the mechanism of checks and balances, but if the offset as well as members of the certification fee Latif / Parliament Parliament should also have the right of veto in order to better balance when the president does not want to pass the bill that has been agreed upon for personal reasons even a group or class , Thus, of course, the wheels of government will be able to walk in a harmonious, balanced, and always hand in hand.

**Keywords:** The presidential veto in Indonesia governance system based on the 1945 constitution of the republic of Indonesia.

---

<sup>1</sup>Students of the Faculty of Law, Universitas of Gadjah Mada

<sup>2</sup>Lecturer at the Faculty of Law, Universitas of Gadjah Mada